

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kesesuaian BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) yang belum sepenuhnya terpenuhi, serta berbagai kendala teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan BMN di KPKNL Lhokseumawe secara umum sudah berjalan cukup baik, didukung oleh ketersediaan aplikasi SIMAN V.2, regulasi PMK, komunikasi yang relatif efektif, dan keberadaan SDM internal yang kompeten. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan di tingkat satuan kerja, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya infrastruktur jaringan internet, lemahnya koordinasi antar organisasi, serta sikap pelaksana yang belum seragam dalam mendukung kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan BMN di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe telah menunjukkan capaian positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Upaya perbaikan diperlukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung yang lebih memadai. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Keuangan melalui DJKN memperkuat mekanisme pendampingan kepada satuan kerja, meningkatkan literasi digital aparatur, serta memastikan ketersediaan infrastruktur penunjang agar kebijakan penggunaan BMN dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Barang Milik Negara.

ABSTRACT

This study is motivated by the level of compliance of BMN utilization with the Standard Goods and Needs Standards (SBSK), which has not been fully achieved, along with various technical and non-technical obstacles in its implementation. The research method applied is descriptive qualitative, using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the implementation of the BMN utilization policy in KPKNL Lhokseumawe has generally proceeded fairly well, supported by the availability of the SIMAN V.2 application, regulatory provisions through PMK, relatively effective communication, and competent internal human resources. Nevertheless, several obstacles remain at the work unit level, including limited human resources, uneven internet infrastructure, weak inter-organizational coordination, and inconsistent attitudes among implementers in supporting the policy. The conclusion of this study is that the implementation of the BMN utilization policy in the KPKNL Lhokseumawe working area has demonstrated positive progress, although it is not yet fully optimal. Improvements are required through stronger inter-agency coordination, capacity building of human resources, and better provision of supporting facilities. As a recommendation, this research suggests that the Ministry of Finance through DJKN should strengthen its assistance mechanisms for work units, enhance digital literacy among government officials, and ensure the availability of adequate supporting infrastructure so that the BMN utilization policy can be implemented more effectively and accountably.

Keywords: *Implementation, Policy, State-Owned Assets.*

..